

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR**

TRIWULAN KE-1

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	13
3.3. Hasil Perhitungan Rata-Rata Per Unsur	243
3.4. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	25
3.5. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	25
BAB IV	26
PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi melalui aplikasi SISUPER. Untuk saat ini rentang waktu pelaksanaan dilakukan dalam tiga bulan mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, dalam rentang waktu tersebut terdapat 45 responden yang berhasil dihimpun.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas PTSP). Hakim Pengawas PTSP akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

Kemudian kuesioner yang didapat dari responden di input ke dalam aplikasi esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan

indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.100	43.76 – 62.100	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

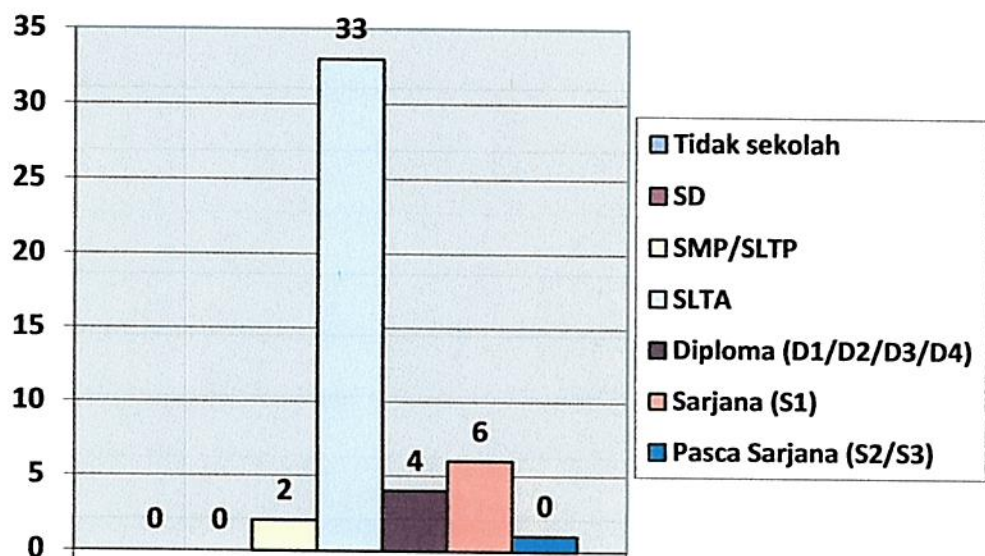
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Berikut ini data responden berdasarkan tingkat pendidikannya:

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Tidak sekolah	0	0
2.	SD	0	0
3.	SMP/SLTP	2	4,44
4.	SLTA	33	73,33
5.	Diploma (D1/D2/D3/D4)	4	8,88
6.	Sarjana (S1)	6	13,33
7.	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0
TOTAL		45	100

Data Grafik

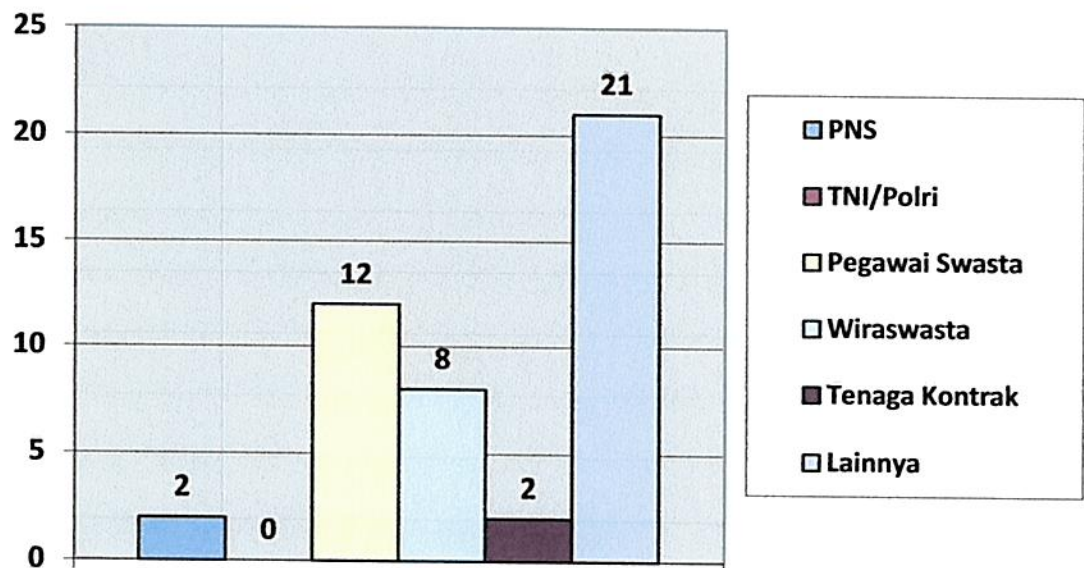


3.1.2. Pekerjaan responden

Berikut ini data responden berdasarkan Jenis Pekerjaannya :

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	2	4,44
2.	TNI/Polri	0	0
3.	Pegawai Swasta	12	26,66
4.	Wirausaha	8	17,77
5.	Tenaga Kontrak	2	4,44
6.	Lainnya	21	46,66
TOTAL		45	100

Data Grafik

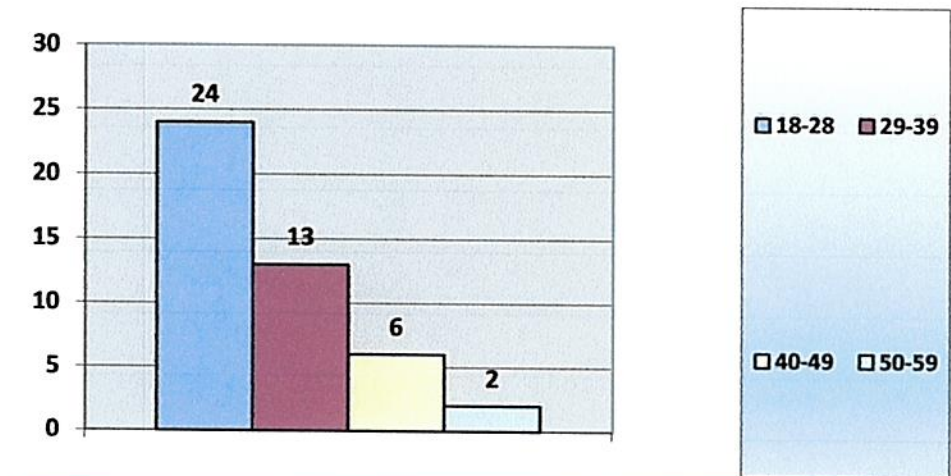


3.1.3. Kelompok usia responden

Berikut ini data responden berdasarkan Usia:

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18-28	24	53,33
2.	29-39	13	28,88
3.	40-49	6	13,33
4.	50-59	2	4,44
5.	60-69	0	2,56
TOTAL		45	100

Data Grafik

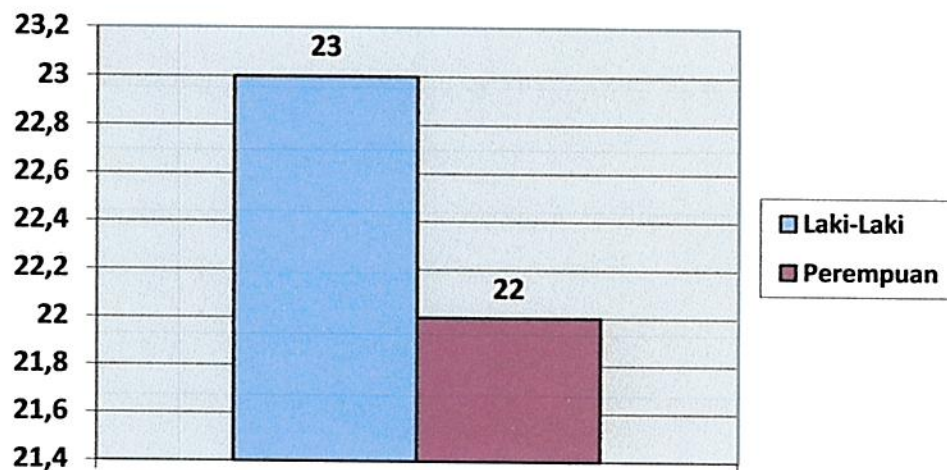


3.1.4. Jenis Kelamin

Berikut ini data responden berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki Laki	23	51,11
2.	Perempuan	22	48,88
TOTAL		45	100

Data Grafik



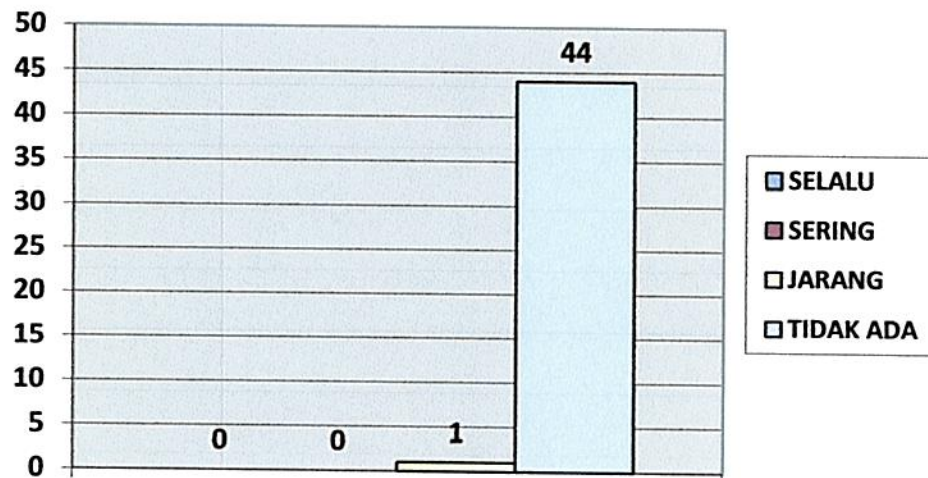
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

Dan berikut ini hasil nilai yang didapat per unsur :

SOAL 1 Manipulasi Peraturan

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	1	2,22
4.	TIDAK ADA	4	4	44	97,77
TOTAL				45	100

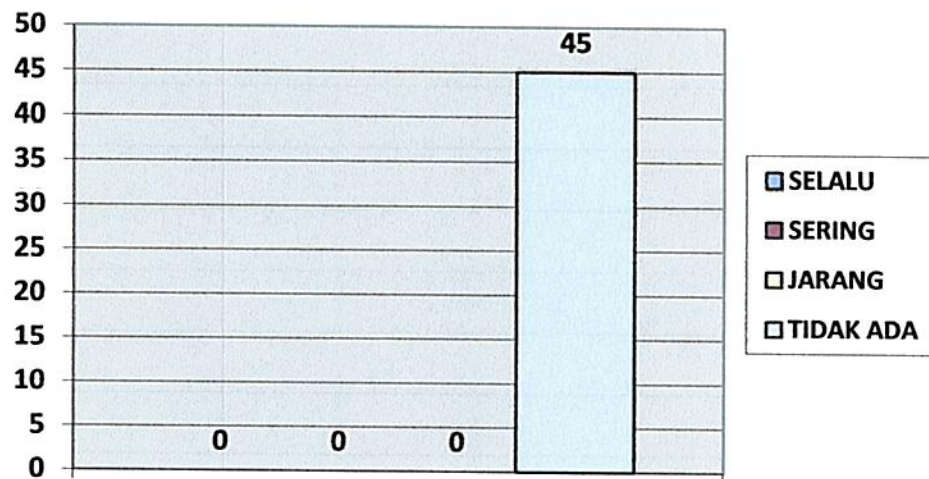
Data Grafik



SOAL 2 Penyalahgunaan Jabatan

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	0	0
4.	TIDAK ADA	4	4	45	100
TOTAL				45	100

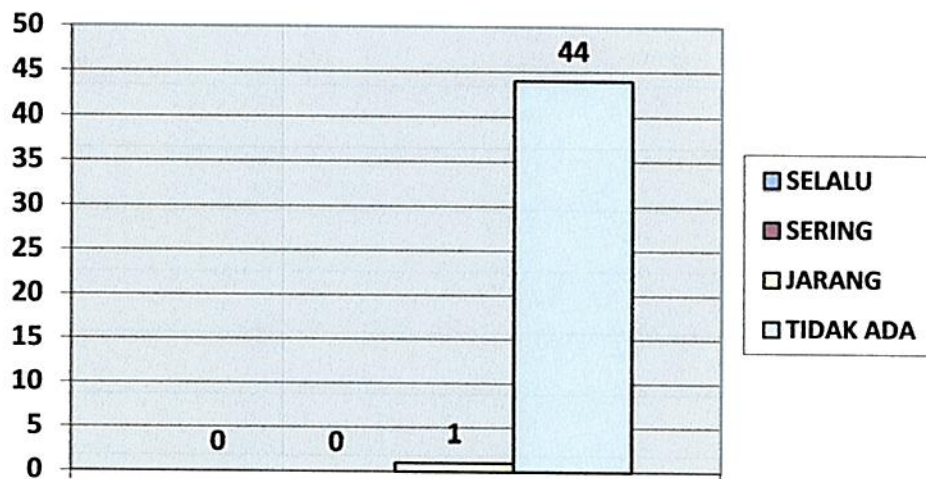
Data Grafik



SOAL 3 Menjual Pengaruh

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	1	2,27
4.	TIDAK ADA	4	4	44	97,77
TOTAL				45	100

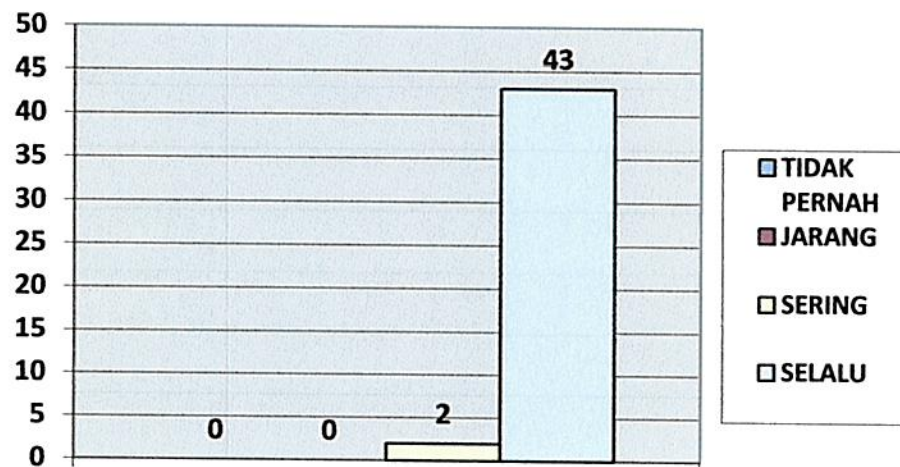
Data Grafik



SOAL 4 Transaksi Biaya

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	TIDAK PERNAH	1	1	0	0
2.	JARANG	2	2	0	0
3.	SERING	3	3	2	4,44
4.	SELALU	4	4	43	95,55
TOTAL				45	100

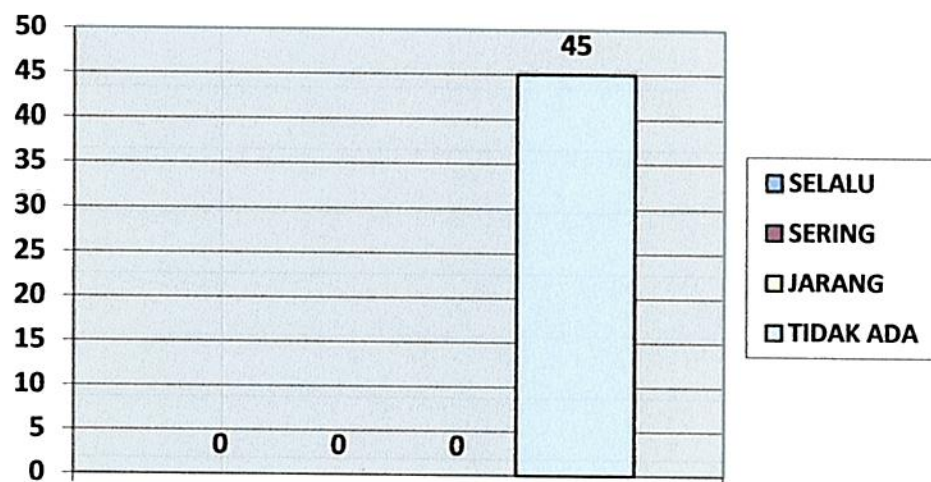
Data Grafik



SOAL 5 Biaya Tambahan

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	0	0
4.	TIDAK ADA	4	4	45	100
TOTAL				45	100

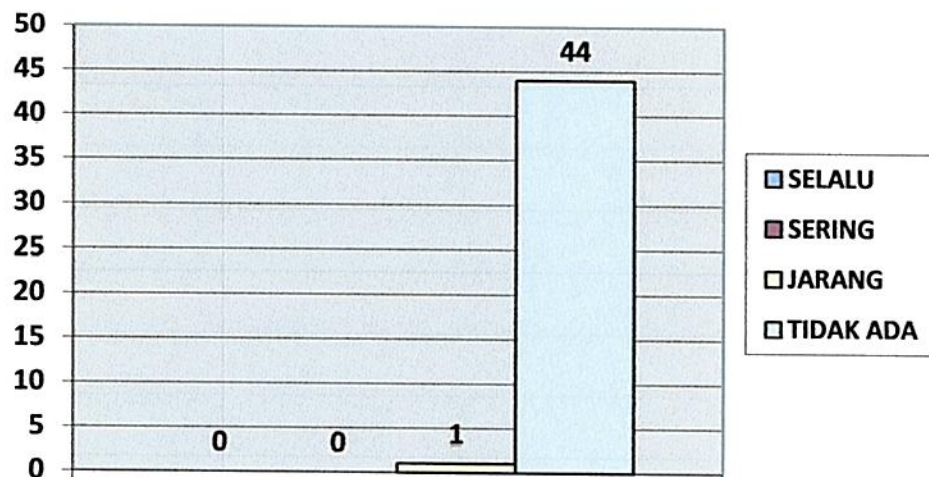
Data Grafik



SOAL 6 Hadiah

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	1	2,22
4.	TIDAK ADA	4	4	44	97,77
TOTAL				45	100

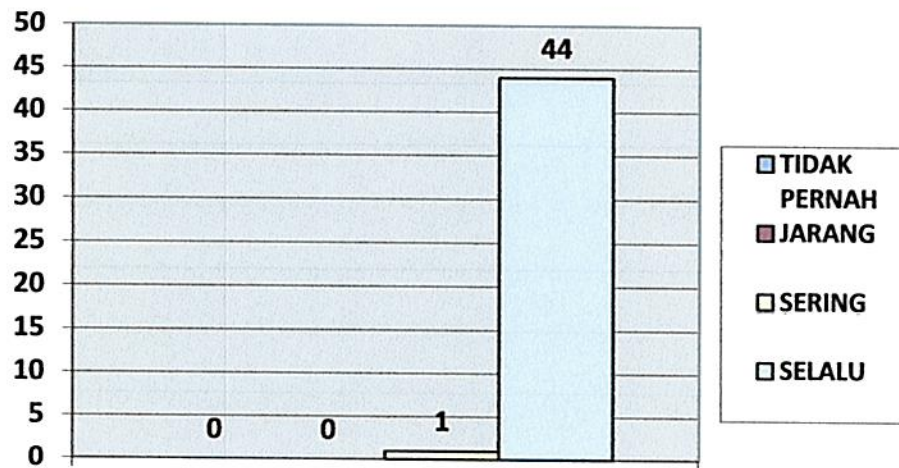
Data Grafik



SOAL 7 Transparasi Biaya

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	TIDAK PERNAH	1	1	0	0
2.	JARANG	2	2	0	0
3.	SERING	3	3	1	2,22
4.	SELALU	4	4	44	97,77
TOTAL				45	100

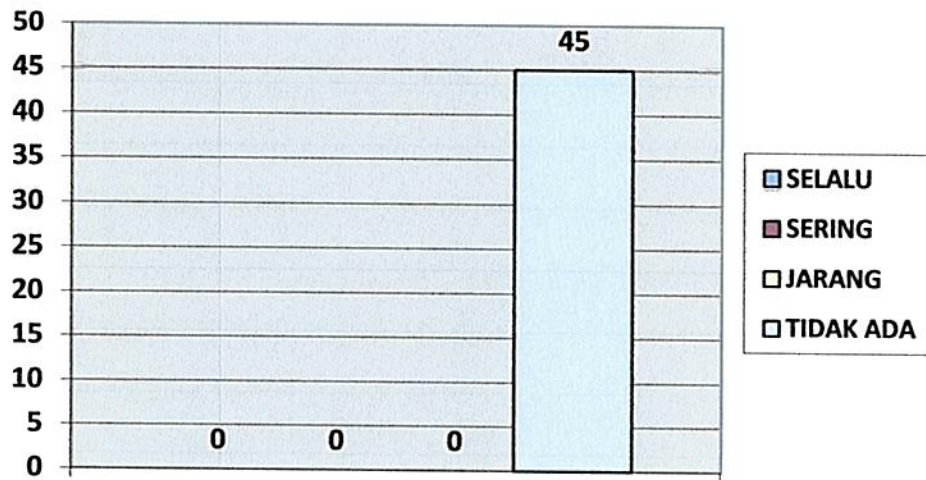
Data Grafik



SOAL 8 Percaloan

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	0	0
4.	TIDAK ADA	4	4	45	100
TOTAL				45	100

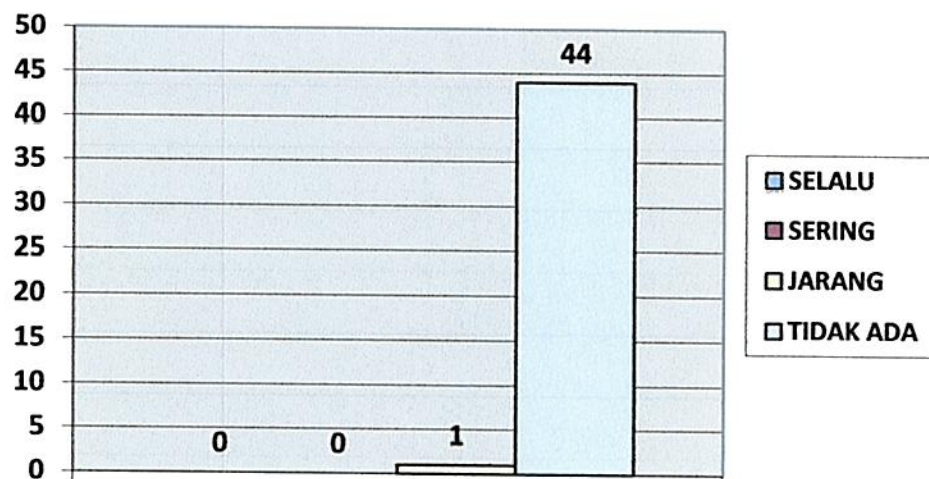
Data Grafik



SOAL 9 Perbuatan Curang

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	1	2,22
4.	TIDAK ADA	4	4	44	97,77
TOTAL				45	100

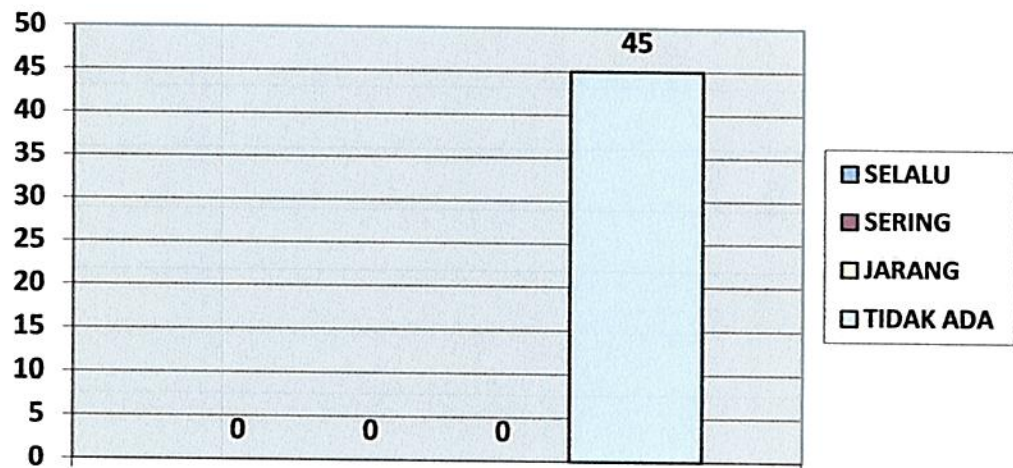
Data Grafik



SOAL 10 Transaksi Rahasia

No	JAWABAN	KODE PILIHAN	SKORE	Frekuensi	%
1.	SELALU	1	1	0	0
2.	SERING	2	2	0	0
3.	JARANG	3	3	0	0
4.	TIDAK ADA	4	4	45	100
TOTAL				45	100

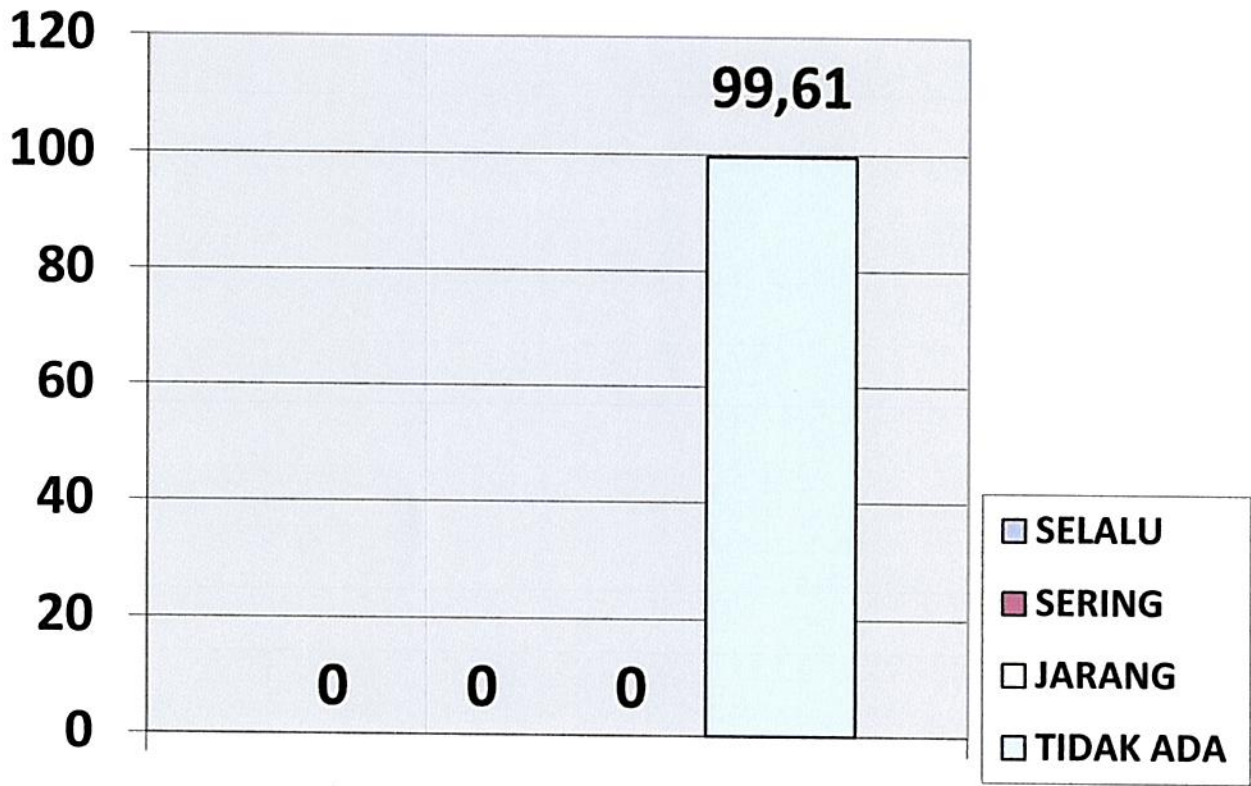
Data Grafik



HASIL PERHITUNGAN RATA-RATA PER UNSUR

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
U1	Manipulasi Peraturan	3,978	Tidak ada
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Tidak ada
U3	Menjual Pengaruh	3,978	Tidak ada
U4	Transaksi Biaya	3,956	Selalu
U5	Biaya Tambahan	4,000	Tidak ada
U6	Hadiah	3,978	Tidak ada
U7	Transparansi Biaya	3,978	Selalu
U8	Percaloan	4,000	Tidak ada
U9	Perbuatan Curang	3,978	Tidak ada
U10	Transaksi Rahasia	4,000	Tidak ada

3.3.



3.4. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah "**Bersih dari korupsi**" dengan rincian hasil perhitungan sebagai berikut :

Dalam penilaian indeks persepsi korupsi menggunakan standard sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.100	43.76 – 62.100	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Nilai Persepsi Korupsi adalah 3,97/99,36 % dengan predikat "**Bersih dari korupsi**"

3.5. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Arga Makmur

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

- Tidak ada masukan dari responden

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Arga Makmur diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Arga Makmur memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,97/99,36 % atau masuk pada kategori "**Bersih dari korupsi**".

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
U1	Manipulasi Peraturan	3,978	Tidak ada
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Tidak ada
U3	Menjual Pengaruh	3,978	Tidak ada
U4	Transaksi Biaya	3,956	Selalu
U5	Biaya Tambahan	4,000	Tidak ada
U6	Hadiah	3,978	Tidak ada
U7	Transparansi Biaya	3,978	Selalu
U8	Percaloan	4,000	Tidak ada
U9	Perbuatan Curang	3,978	Tidak ada
U10	Transaksi Rahasia	4,000	Tidak ada

Arga Makmur, 31 Maret 2024

Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur



Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar